



Perkebunan Nusantara



# LAPORAN

## PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) TAHUN 2024

### MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI YANG BERMAKNA DAN BERDAMPAK POSITIF

“Optimalisasi Komunikasi Strategis untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Partisipasi Publik dalam Pengembangan Perusahaan”

# 01 DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	i
Kata Pengantar	ii
Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik PTPN Group	2
Program Kerja Komunikasi Publik	6
Komitmen dan Peran Aktif <i>Top Management</i>	13
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	17
Anggaran Keterbukaan Informasi Publik	20
Hasil Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	22
Capaian PPID dan Komunikasi PTPN Group	25
Kendala dan Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Layanan Informasi Publik	27

# 02 DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Struktur PPID Utama	4
<b>Gambar 2.</b> Struktur PPID Pelaksana	5
<b>Gambar 3.</b> Rapat berkala PPID dan MONEV internal PTPN Group	7
<b>Gambar 4.</b> Hasil pengembangan website yang memuat informasi PPID PTPN I	7
<b>Gambar 5.</b> Hasil pengembangan website yang memuat informasi PPID PTPN IV	7
<b>Gambar 6.</b> Media komunikasi pembinaan PPID Pelaksana	8
<b>Gambar 7.</b> Workshop keterbukaan informasi bersama Komisi Informasi Pusat	8
<b>Gambar 8.</b> Saluran komunikasi PPID PTPN Group	8
<b>Gambar 9.</b> Kolaborasi keterbukaan informasi dengan media-media nasional	9

<b>Gambar 10.</b> Pelatihan pengelolaan komunikasi publik bagi komunitas <i>Social Media Ranger</i>	9
<b>Gambar 11.</b> Konten-konten kolaborasi komunikasi dengan berbagai pihak eksternal	12
<b>Gambar 12.</b> Cuplikan program Bincang PTPN	13
<b>Gambar 13.</b> Halaman Youtube program Bincang PTPN	13
<b>Gambar 14.</b> Partisipasi Direktur Utama pada uji publik keterbukaan informasi	14
<b>Gambar 15.</b> Seluruh Direksi holding dan subholding menghadiri <i>workshop</i> keterbukaan informasi publik	15
<b>Gambar 16.</b> Ruang pelayanan informasi publik Holding Perkebunan Nusantara	17
<b>Gambar 17.</b> Website holding-perkebunan.com yang memuat informasi PPID	17
<b>Gambar 18.</b> Video tutorial pelayanan informasi publik PTPN	18
<b>Gambar 19.</b> Fasilitas area parkir khusus dan kursi roda di perkantoran PTPN	18
<b>Gambar 20.</b> Aplikasi mobile PPID PTPN	19
<b>Gambar 21.</b> Konten-konten kreatif untuk meningkatkan engagement dengan publik	20
<b>Gambar 22.</b> Penghargaan PTPN III (Persero) sebagai Top 5 BUMN Informatif	25
<b>Gambar 23.</b> PTPN I regional 4 menerima penghargaan pada <i>Media Relations Award</i> 2024	26
<b>Gambar 24.</b> PTPN IV menerima penghargaan <i>Outstanding Sustainable Initiatives</i> pada CNN Indonesia Awards 2024	26



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 ini. Laporan ini merupakan wujud komitmen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau Holding Perkebunan Nusantara dalam mengembangkan keterbukaan informasi yang tidak hanya sekadar transparan, tetapi juga memiliki nilai strategis dan memberikan dampak positif bagi publik dan pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi. Dedikasi dan kerjasama yang solid ini telah membawa perusahaan meraih penghargaan “Top 5 BUMN Informatif” dengan nilai hampir sempurna yakni 98,31 pada ajang Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat.

Sepanjang tahun 2024, Holding Perkebunan Nusantara bersama anak perusahaan telah melakukan langkah nyata untuk menjadikan informasi sebagai aset strategis yang tidak hanya memenuhi kewajiban transparansi, tetapi juga untuk pengambilan keputusan perusahaan yang lebih baik. *Top Management* turut berperan dalam program literasi publik melalui berbagai platform komunikasi, baik melalui kolaborasi dengan media eksternal maupun internal seperti “Bincang PTPN” pada Youtube. Berbagai topik diangkat dalam program ini, mulai dari pengembangan kompetensi internal hingga pencapaian kinerja perusahaan yang relevan bagi publik. Upaya proaktif ini telah berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan interaksi dengan publik, serta membuka ruang bagi masukan dan saran yang konstruktif bagi perusahaan.

Dalam menghadapi era digital, perusahaan juga terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui berbagai inisiatif digital, salah satunya dengan pengembangan aplikasi PPID. Aplikasi ini dirancang untuk melengkapi dan menunjang media informasi yang telah aktif, seperti website resmi: <https://holding-perkebunan.com/> dan media sosial. Dengan fitur-fitur utama seperti akses ke informasi berkala perusahaan, pengajuan permohonan informasi secara daring, pelacakan status permohonan, serta penyediaan dokumen digital, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi secara cepat dan transparan. Ke depannya, kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan informasi yang lebih profesional, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan publik dan pemangku kepentingan, sesuai dengan semangat kolaborasi dan inovasi.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi yang lebih bernilai dan berdampak positif bagi perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas.

Atasan PPID Utama  
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Misran





## **GAMBARAN UMUM** KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam era keterbukaan informasi, transparansi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan fondasi tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) yang membawahi dua subholding yaitu PT Perkebunan Nusantara I atau disebut SupportingCo dan PT Perkebunan Nusantara IV atau PalmCo, memahami bahwa layanan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses dapat menjadi pendukung perubahan serta membuka ruang partisipasi yang konstruktif antara perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Sejalan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, akuntabel, dan bernilai strategis guna mendukung pengembangan industri perkebunan nasional.

Dalam menjalankan layanan informasi publik, PPID PTPN III (Persero) berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Nomor: DSPN/SKPTS/129/2023 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Pedoman ini mengatur prinsip pelayanan informasi, struktur dan tugas serta wewenang PPID di tingkat holding maupun subholding, klasifikasi informasi yang dapat dibuka dan tidak dapat dibuka atau dikecualikan, mekanisme permintaan dan pengajuan keberatan, hingga pelaporan hasil layanan informasi.

Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, perusahaan menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DSPN/SKPTS/129/2023 yang mengatur peran, tugas, dan tanggung jawab setiap unit dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. SK ini memastikan bahwa struktur PPID di tingkat holding, subholding, dan wilayah kerja yang ada dibawahnya berjalan secara terintegrasi dengan sistem koordinasi yang efektif. Selain itu, mekanisme pelaporan yang ditetapkan dalam pedoman menjadi acuan utama dalam evaluasi kinerja tim PPID, baik secara internal maupun dalam pelaporan kepada Komisi Informasi serta publik.

Dengan semangat baru dalam mengusung transparansi, pada tahun 2024 PPID PTPN III (Persero) beserta subholding telah menyelesaikan proses pemenuhan ketentuan penyelenggaraan layanan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kini publik tidak hanya dapat mengajukan informasi dengan mudah ke holding tetapi juga subholding. Mereka telah memiliki fungsi PPID yang diberi kewenangan mengelola permintaan informasi, menyediakan layanan yang transparan dan mudah diakses, hingga menyelesaikan proses keberatan informasi publik.

## Visi PPID PTPN Group

“Menjadi Perusahaan Informatif yang Mengedepankan Sinergi dan Inovasi Dalam Memberikan Layanan Informasi Publik.”

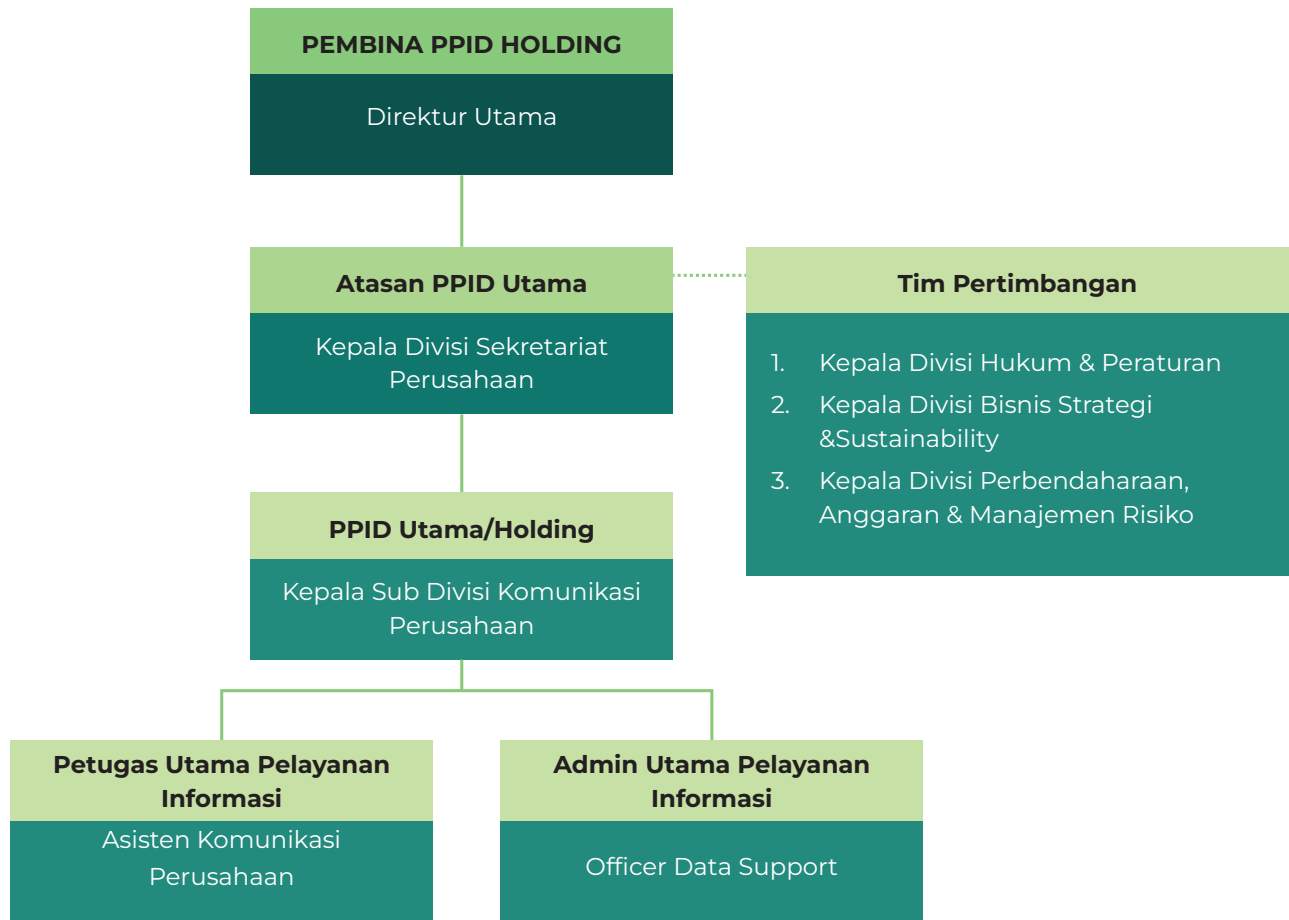
## Misi PPID PTPN Group

1. Menyediakan layanan informasi yang mudah diakses oleh seluruh kalangan termasuk difabel;
2. Memperkuat kolaborasi dalam penyebaran informasi dengan subholding dan stakeholder terkait;
3. Meningkatkan kompetensi SDM layanan informasi publik secara berkala;
4. Terus berinovasi untuk menghadirkan layanan informasi yang sesuai perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan publik;
5. Meningkatkan edukasi untuk memastikan publik mengetahui dan memahami hak dan tanggung jawabnya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi perusahaan;
6. Melakukan program-program pengawasan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi secara berkala.

## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Menyelenggarakan pelayanan informasi berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008;
2. Menyediakan informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui media yang efektif dan efisien;
4. Melayani permintaan informasi publik dengan tanggap dan tepat waktu;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, nyaman, dan ramah difabel;
6. Menyiapkan Petugas Pelayanan Informasi yang memenuhi kualifikasi dan berdedikasi;
7. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan informasi secara berkala;
8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





Gambar 1. Struktur PPID Utama

## Tata Kelola PPID Pelaksana Pada Subholding

Untuk memastikan penyelenggaraan layanan informasi publik berjalan efektif, PPID PTPN Group menerapkan sistem desentralistik. Sistem ini memungkinkan setiap anak perusahaan atau subholding untuk memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam mengelola informasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan operasionalnya.

Dengan sistem ini, PTPN III (Persero) sebagai holding berperan dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengembangan kompetensi guna memastikan standar keterbukaan informasi tetap terjaga di seluruh entitas perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis, seperti rapat koordinasi berkala, pelatihan terkait

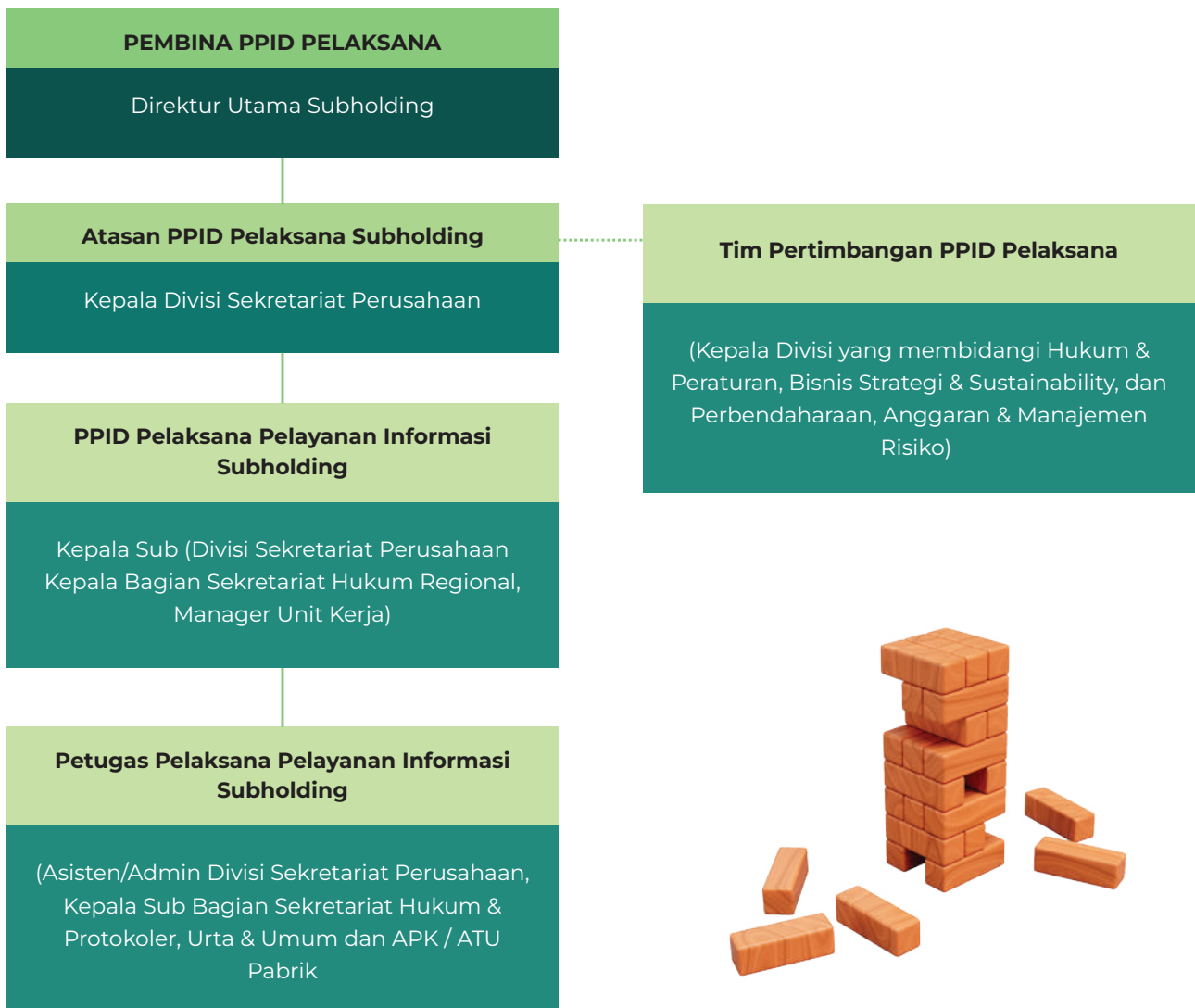
pengelolaan informasi publik, serta program apresiasi bagi PPID terbaik di lingkungan anak perusahaan. Program ini melibatkan Komisi Informasi Pusat serta tenaga ahli independen guna memastikan penerapan prinsip transparansi yang optimal. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan kesadaran dan partisipasi anak perusahaan dalam menyajikan layanan informasi yang lebih profesional, baik melalui pengelolaan platform digital maupun pelayanan langsung kepada publik.

## Struktur PPID Pelaksana (PT Perkebunan Nusantara I dan PT Perkebunan Nusantara IV)

Sebagai bagian dari PTPN Group, PTPN I dan PTPN IV berperan penting dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Melalui koordinasi dengan holding, PPID Pelaksana mengadopsi kebijakan strategis yang dirancang untuk memenuhi standar keterbukaan informasi, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi maupun peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh PPID Pelaksana sebagai tindak lanjut dari arahan PPID Utama diantaranya

terkait penyusunan turunan dari Pedoman Pelayanan Informasi Publik, optimalisasi platform digital untuk publikasi informasi, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi di setiap wilayah kerja atau regional.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan informasi publik, struktur PPID Pelaksana disusun dengan ketentuan sebagai berikut:



Gambar 2. Ketentuan Struktur PPID Pelaksana

## PROGRAM KERJA KOMUNIKASI PUBLIK

PTPN menerapkan strategi komunikasi publik yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memastikan transparansi, konsistensi, dan efektivitas dalam penyampaian informasi kepada publik. Melalui berbagai media komunikasi seperti website, media sosial, publikasi resmi, dan diskusi langsung, PTPN menyampaikan pesan yang selaras dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi dikelola melalui fungsi PPID, sementara kerja sama dengan media dan pemangku kepentingan memperkuat engagement serta kredibilitas perusahaan. Dalam situasi krisis, strategi komunikasi yang cepat dan berbasis data diterapkan oleh perusahaan untuk menghindari misinformasi dan menjaga reputasi. Pendekatan ini memungkinkan PTPN membangun kepercayaan publik serta mendukung citra industri perkebunan yang profesional dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, PPID Utama melakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) internal yang menilai implementasi keterbukaan informasi pada PPID Pelaksana. Indikator yang digunakan antara lain menyangkut kelengkapan dokumen tata kelola PPID, publikasi informasi pada website, serta inisiatif-inisiatif peningkatan kualitas layanan dan kompetensi pengelola PPID di subholding. Hasil evaluasi ini menghasilkan rekomendasi bagi holding sebagai Pembina PPID, untuk memperbarui kembali pedoman pelayanan informasi publik yang lebih rinci dan relevan dengan perkembangan saat ini, dan agar PPID Pelaksana lebih dilibatkan dalam program-program pelatihan terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, program kerja komunikasi yang dilakukan selama tahun 2024 diantaranya:

### 1. Penyempurnaan dan integrasi pelayanan informasi publik pada holding dan subholding;

Pada tahapan ini, PTPN berupaya untuk meningkatkan standarisasi dan kualitas pelayanan di lingkungan PTPN Group. Dengan adanya integrasi, setiap PPID diharapkan

dapat mengadopsi standar layanan yang lebih tinggi, termasuk dalam mekanisme permohonan informasi, transparansi kebijakan, serta pengelolaan dokumentasi yang sistematis. Program-program yang telah dilaksanakan diantaranya:

1. Pembaruan struktur PPID pada holding, yang memuat rincian struktur PPID pada subholding sebagai PPID Pelaksana.
2. Penyusunan dan penyampaian pedoman umum penyelenggaraan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana yang mencakup ketentuan teknis pelayanan informasi, sarana dan prasarana yang perlu disediakan, klasifikasi informasi, hingga mekanisme pelaporan kepada PPID Utama.
3. Pendampingan pemenuhan indikator keterbukaan informasi publik sesuai dengan yang telah diperbarui Komisi Informasi Pusat per tahun 2024.
4. Pembaruan Daftar Informasi Publik yang mencakup Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi yang Tersedia Setiap Saat.
5. Pengembangan website dan media sosial agar memuat konten-konten keterbukaan informasi baik pada holding maupun subholding.
6. Koordinasi berkala untuk membahas program-program komunikasi strategis bersama seluruh pengelola komunikasi subholding baik secara langsung maupun melalui grup whatsapp.
7. Konsolidasi dalam penyusunan laporan layanan informasi publik PTPN Group. Dalam hal ini subholding mendukung penyediaan data yang mencakup hasil penyelenggaraan layanan informasi publik selama tahun 2024, program kerja untuk mendukung keterbukaan informasi, hingga kendala selama pelaksanaan program kerja PPID.



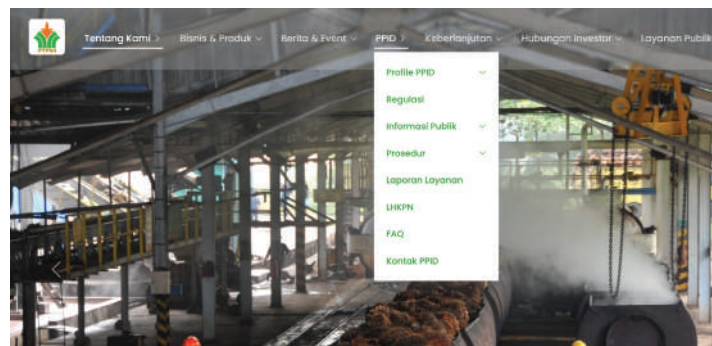
Gambar 3. Rapat berkala PPID dan MONEV internal PTPN Group

Dengan berbagai inisiatif ini, PTPN Group terus memperkuat kapasitas dan peran PPID Pelaksana dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan keterbukaan informasi. Melalui tata kelola yang lebih sistematis, peningkatan

kompetensi SDM, serta optimalisasi kanal komunikasi digital, diharapkan layanan informasi publik yang diselenggarakan dapat semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 4. Hasil pengembangan website yang memuat informasi PPID PTPN I



Gambar 5. Hasil pengembangan website yang memuat informasi PPID PTPN IV

**2. Peningkatan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi perusahaan baik di tingkat holding maupun subholding dilakukan melalui kegiatan:**

Pada tahapan ini, PTPN berupaya untuk meningkatkan standarisasi dan kualitas

1. Workshop Keterbukaan Informasi Publik dengan melibatkan pembicara dari Komisi Informasi Pusat
2. Partisipasi pada Workshop Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Kementerian BUMN.
3. Sharing session teknis pengelolaan konten-konten keterbukaan informasi pada website bersama praktisi keterbukaan informasi.
4. Asistensi pengembangan dan pemenuhan konten-konten keterbukaan informasi pada website dan media sosial subholding.



Gambar 6. Media komunikasi pembinaan PPID Pelaksana



Gambar 7. Workshop keterbukaan informasi bersama Komisi Informasi Pusat

**3. Program Komunikasi Eksternal**

Program komunikasi eksternal merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk membangun, memperkuat, dan meningkatkan citra positif perusahaan. Selain itu juga untuk memastikan informasi mengenai program kerja perusahaan dapat tersampaikan secara efektif, diantaranya:

**a. Pengelolaan Platform Digital Perusahaan**

Platform digital perusahaan digunakan untuk memperkuat komunikasi dengan publik melalui website resmi, media sosial, dan media informasi lainnya. Dengan pendekatan ini, PTPN tidak hanya berupaya meningkatkan efektivitas bisnis tetapi juga memastikan keterbukaan informasi yang selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

**PPID Utama**

holding-perkebunan.com	holdingperkebunan
ppidptpn@holding-perkebunan.com	@holdingperkebunan
	@holding_ptpn
	Nusantara Planters

**PPID Pelaksana**  
PT Perkebunan Nusantara 1 (SupportingCo)

ptpn1.co.id	ptpn1.supportingco
skr@ptpn1.co.id	PT Perkebunan Nusantara 1
	PTPN 1 SupportingCo

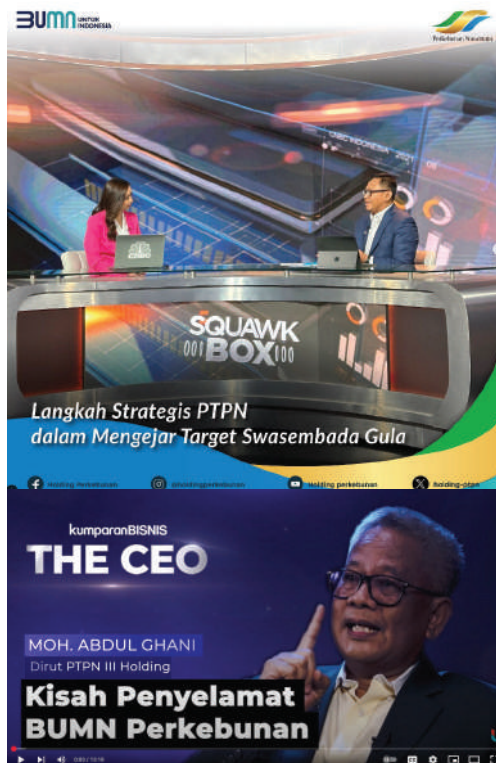
**PPID Pelaksana**  
PT Perkebunan Nusantara IV (PalmCo)

ptpn4.co.id	ptpn4_palmco
ptpnusantara4@ptpn4.co.id	Ptpn PalmCo

Gambar 8. Saluran komunikasi PPID PTPN Group

b. Kerjasama dengan Media Nasional dan Lokal

Perusahaan menjalin kemitraan dengan media-media nasional maupun lokal untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan, program kerja, serta dampak yang dihasilkan oleh perusahaan. Publikasi berita, artikel, dan liputan eksklusif memungkinkan masyarakat memahami bagaimana program perusahaan berkontribusi pada kepentingan publik. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam *media gathering* untuk memastikan jurnalis memiliki akses langsung terhadap data dan narasi yang benar mengenai berbagai inisiatif perusahaan. Dengan komunikasi yang terbuka dan proaktif, masyarakat dapat lebih mudah menilai manfaat dari program yang dijalankan serta memberikan masukan yang konstruktif.



Gambar 9. Kolaborasi keterbukaan informasi dengan media-media nasional

c. Social Media Ranger

Tim khusus yang dibentuk untuk mendukung pengelolaan berbagai platform digital komunikasi perusahaan, mengembangkan konten-konten interaktif, serta merespons isu-isu yang berkembang tentang perusahaan. *Social Media Ranger* juga berfokus pada engagement dengan komunitas digital dalam menyukseskan kampanye dan diskusi online untuk memperluas jangkauan komunikasi perusahaan. Untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan tim ini, perusahaan secara berkala mengadakan pelatihan komunikasi publik yang melibatkan pihak-pihak yang ahli di bidangnya.



Gambar 10. Pelatihan pengelolaan komunikasi publik bagi komunitas *Social Media Ranger*

d. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal untuk mempublikasikan program kerja perusahaan

Perusahaan menjalin kemitraan dengan media-media nasional maupun lokal untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi terkait kebijakan, program kerja, serta dampak yang dihasilkan oleh perusahaan. Publikasi berita, artikel, dan liputan eksklusif memungkinkan masyarakat memahami bagaimana program perusahaan berkontribusi pada kepentingan publik. Selain itu, perusahaan juga aktif dalam media gathering untuk memastikan jurnalis memiliki akses langsung terhadap data dan narasi yang benar mengenai berbagai inisiatif perusahaan. Dengan komunikasi yang terbuka dan proaktif, masyarakat dapat lebih mudah menilai manfaat dari program yang dijalankan serta memberikan masukan yang konstruktif.

**Instansi Pemerintah & BUMN**

1. Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam program Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung keamanan dan operasional perusahaan.
2. Holding PTPN dan berbagai BUMN dalam promosi program Jelajah Kuliner Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bersama BUMN penyelenggara.
3. Holding PTPN dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam program webinar bertemakan "Waspada Bahaya Pinjaman Online Ilegal."
4. Program audiensi dengan Badan Narkotika Nasional RI dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba di lingkungan perusahaan.
5. Bersama PT Telkom Indonesia (Persero) dalam program *benchmarking* terkait transformasi yang telah berhasil dilakukan oleh PTPN Group

6. Bersama Komisi Informasi Pusat dalam program *Workshop* Keterbukaan Informasi Publik.

**Lembaga Non Pemerintah dan Perguruan Tinggi**

1. PTPN III dan T.CARE berkolaborasi dalam mengomunikasikan program bantuan sosial sembako kepada warga sekitar dan wali murid Sekolah Alam Tunas Mulia yang berlokasi di Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi.
2. Bersama BAZNAS mengomunikasikan capaian Holding PTPN III (Persero) dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dan perolehan kategori "The Rising Star" dalam ajang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Award 2023.
3. Bersama Universitas Sumatera Utara dalam Program Kelas Khusus Magister Manajemen untuk mendukung pengembangan pendidikan karyawan, mendorong minat mereka untuk melanjutkan pendidikan formal.
4. Bersama Universitas Jember (Unej) dalam program kerja sama penguatan ketahanan pangan nasional dan menghadapi tantangan global.
5. Bersama LSP Human Capital Management Indonesia dalam program Uji Kompetensi BNSP Bidang Human Capital.
6. Bersama Tokopedia mengumumkan kolaborasi strategis dengan *Project Management Office* (PMO) Kopi Nusantara Kementerian BUMN untuk mendorong budidaya kopi berkelanjutan dan meningkatkan pemasaran produk kopi spesial di Indonesia.
7. Bersama Yayasan BUMN dalam program *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan tiga wirausaha sosial (Kulaku, PT RPN dengan Bell Living Lab, dan PTPN IV dengan Arconesia) dalam acara Final Showcase Pikiran Terbaik Negeri 2024.

### Anak Perusahaan (Subholding)

1. Kolaborasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dengan PT LPP Agro Nusantara dalam publikasi program Pelatihan Peningkatan Kompetensi untuk Petani Tebu yang menjadi mitra PT Sinergi Gula Nusantara
2. Sosialisasi program prelevansi stunting melalui pendistribusian 1.109 paket bantuan program stunting, yang akan berkelanjutan disalurkan selama 6 bulan.
3. Kerja Sama Operasi (KSO) Sub Holding Perkebunan Nusantara antara PTPN IV PalmCo dengan PTPN I SupportingCo telah efektif pertanggal 1 April 2024.
4. Berkolaborasi dalam publikasi penyaluran seribu paket sembako kepada korban terdampak terjangkit banjir yang melanda Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Publikasi penghargaan sebagai "The Most Promising Company in Strategic Marketing" pada ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) 2024
6. Publikasi program, tanam ulang kebun sawit petani KUD Tani Makmur di Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Langkat Provinsi Sumatera Utara
7. Bersama Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN serta PT Semen Padang dalam program penyaluran bantuan kepada warga Agam dan Tanah Datar khususnya pada bidang pendidikan dan fasilitas rumah ibadah.
8. Publikasi Program Penguatan Tebu Rakyat melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) untuk mendukung target swasembada gula konsumsi pada tahun 2028.
9. Publikasi penerimaan ganti rugi PTPN I Regional 7 dari PT Utama Karya Infrastruktur (HKI) atas 69 hektare lahan untuk pembangunan Tol Indralaya-Muara Enim, Sumatera Selatan.
10. Program penandatanganan (MoU) dengan Yang Lou Dong untuk memperkuat posisi PTPN I di pasar teh global, membuka peluang baru dalam pengembangan produk, dan meningkatkan kualitas teh Indonesia dengan memanfaatkan teknologi modern.
11. Publikasi program Gerakan Cinta Produk (Gercep) PTPN yang di inisiasi oleh karyawan perusahaan dan ditandai dengan pendistribusian ribuan produk-produk berkualitas hasil produksi perusahaan.
12. Publikasi pemberian bantuan untuk pengembangan Rumah SIGAP ARMADA untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).
13. Publikasi bersama peresmian PTPN Daycare di Gedung Agro Plaza, Jakarta.
14. Publikasi bersama program Inkubator Agripreneur Tebu

Selain program-program di atas, perusahaan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan program keberlanjutan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, mencakup inisiatif di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Informasi lebih lanjut mengenai implementasi dan dampak program TJSL telah dipublikasikan dalam Laporan Keberlanjutan, yang dapat diakses melalui laman resmi <https://holding-perkebunan.com/sustainability/laporan-keberlanjutan/>



Gambar 11. Konten-konten kolaborasi komunikasi dengan berbagai pihak eksternal



# KOMITMEN DAN PERAN AKTIF TOP MANAGEMENT TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## Program “Bincang PTPN”

Salah satu bentuk nyata komitmen *Top Management* Holding Perkebunan Nusantara terhadap keterbukaan informasi publik adalah melalui program unggulan “Bincang PTPN”, yang secara rutin menghadirkan Direksi sebagai narasumber utama. Program ini menjadi wadah komunikasi yang efektif antara manajemen dan publik, dimana Direksi secara langsung menyampaikan berbagai kebijakan strategis perusahaan, pencapaian kinerja, hingga tantangan yang dihadapi.

Melalui Bincang PTPN, *Top Management* juga menunjukkan keterbukaan dalam menerima pertanyaan, kritik, dan masukan baik dari audiens internal maupun publik. Program ini tidak sekadar menjadi forum sosialisasi kebijakan, tetapi juga ruang diskusi interaktif yang memungkinkan perusahaan mendapatkan perspektif dari berbagai pihak. Dengan pendekatan ini, perusahaan mampu membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif, sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan merasa lebih terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, program yang dikemas dalam bentuk podcast ini telah membagikan sebanyak 34 video, dan dapat diakses melalui Youtube di alamat:

[https://www.youtube.com/@Bincang\\_PTPN](https://www.youtube.com/@Bincang_PTPN)

Sepanjang tahun 2024, topik yang diangkat dalam program Bincang PTPN dan menghadirkan Direktur Utama, Bpk. Muhammad Abdul Ghani, diantaranya sebagai berikut:

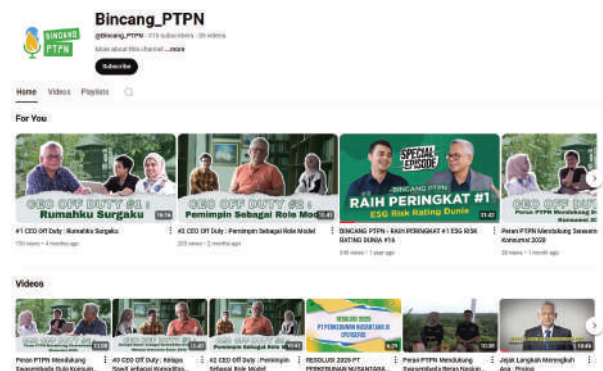
1. Fenomena Post-Truth
2. Ir.H.Azwar dan Perkebunan Rakyat
3. Helicopter View
4. Peran PTPN Dalam Mendukung Kemandirian Pangan dan Energi Nasional
5. Equilibrium Baru Industri Kelapa Sawit
6. Menyiapkan Transformasi yang Berkelanjutan

7. Menuju Perkebunan Kelapa Sawit Terluas di Dunia
8. Perpres No.40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
9. PTPN Raih Peringkat #1 ESG Risk Rating Dunia
10. Menuju Indonesia Emas 2045 Melalui Industri Perkebunan
11. Peran Milenial dalam Mencapai Kedaulatan Pangan
12. CEO Off Duty: Rumahku Surgaku
13. Jejak Langkah Merengkuh Asa: Prolog



BINCANG PTPN - PERAN PTPN DALAM Mendukung KEMANDIRIAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL #11

Gambar 12. Cuplikan program Bincang PTPN



Gambar 13. Halaman Youtube program Bincang PTPN

### Uji Publik Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

Top Management Holding Perkebunan Nusantara, yang secara langsung diwakili oleh Direktur Utama, Bapak Muhammad Abdul Ghani, berpartisipasi dalam uji publik sebagai bagian dari tahapan penting dalam proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini berlangsung pada 12-14 November 2024 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, dan bertujuan untuk menilai sejauh mana badan publik, termasuk Holding Perkebunan Nusantara, telah mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Partisipasi langsung dari jajaran pimpinan tertinggi menunjukkan komitmen perusahaan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik.

Dalam presentasinya, Bapak Muhammad Abdul Ghani memaparkan berbagai kebijakan yang diterapkan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan perusahaan. Beliau menjelaskan langkah-langkah strategis perusahaan dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat bersifat transparan, mudah diakses, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, juga menyoroti program kerja yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola informasi publik, termasuk pelatihan bagi PPID guna memastikan pelayanan informasi yang profesional dan kredibel.

Selain aspek kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM, Holding Perkebunan Nusantara juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transparansi dan efektivitas komunikasi publik. Melalui sinergi dengan instansi pemerintah, media, serta komunitas masyarakat, perusahaan berupaya menghadirkan inovasi dalam penyebaran informasi, seperti pengembangan media digital yang interaktif dan penyediaan data yang lebih komprehensif bagi publik.



Gambar 14. Partisipasi Direktur Utama pada uji publik keterbukaan informasi



Gambar 15. Seluruh Direksi holding dan subholding menghadiri *workshop* keterbukaan informasi publik

### *Workshop* Keterbukaan Informasi Publik

Holding Perkebunan Nusantara menggelar *Workshop* Keterbukaan Informasi Publik pada 9 November 2024 yang dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi dan PPID, baik dari holding maupun subholding, sebagai wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi. Acara ini menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat yang memberikan pemaparan mendalam mengenai regulasi keterbukaan informasi, peran strategis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta langkah-langkah optimalisasi layanan informasi kepada publik.

*Workshop* ini menjadi momentum penting bagi PTPN dalam memperkuat pemahaman jajaran manajemen terkait prinsip-prinsip keterbukaan informasi yang efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, peserta mendapatkan wawasan mengenai tantangan dan solusi dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, serta mudah diakses oleh masyarakat.





# MALAM ANUGERAH

## KETURBUKAAN

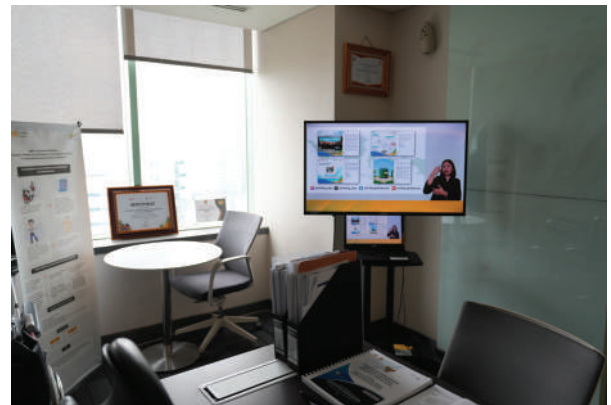
A, 17 D... ER 2

## SARANA & PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Layanan Informasi Langsung & Melalui Website

PTPN Group terus mengembangkan sarana dan prasarana layanan informasi publik yang memadai, mudah diakses, dan memperhatikan kebutuhan Pemohon dengan kebutuhan khusus atau difabel. Sarana yang disediakan mencakup layanan langsung dan digital. Melalui layanan langsung, masyarakat dapat mengakses informasi di pusat layanan PPID yang tersedia di kantor pusat dan kantor anak perusahaan, dimana Petugas Pelayanan Informasi Publik siap memberikan pendampingan serta menjawab permintaan informasi.

Selain layanan langsung, PTPN Group juga menyediakan website yang memuat informasi terkait PPID. Melalui *platform* ini, publik dapat mengajukan permintaan informasi, mengakses data dan laporan yang telah disediakan, hingga mengajukan keberatan informasi apabila tindak lanjut PPID tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik karena ketidaksesuaian informasi yang diberikan, batas waktu jawaban yang melebihi ketentuan, maupun pengenaan biaya yang tidak sesuai.



Gambar 16. Ruang pelayanan informasi publik Holding Perkebunan Nusantara



Gambar 17. Website holding-perkebunan.com yang memuat Informasi PPID

Untuk dapat mengajukan permintaan informasi melalui website, publik dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kunjungi website <https://holding-perkebunan.com/>
2. Pada halaman utama, akses menu “PPID” dan pilih Menu “Prosedur” kemudian pilih “Permintaan Informasi”.
3. Isi formulir permintaan informasi. Lengkapi data diri seperti nama, nomor KTP/SIM, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya isi detail informasi yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi, dan format bahan informasi (tercetak atau terekam).
4. Tentukan jenis permohonan, apakah perorangan, kelompok, atau badan hukum. Pastikan untuk mengunggah dokumen pendukung yang relevan.
5. Setelah memastikan seluruh data terisi dengan benar, klik tombol “Submit” untuk mengirim permintaan informasi.

Setelah melakukan permintaan informasi, baik secara langsung maupun melalui website, selanjutnya akan diproses dengan mekanisme berikut:

1. Pemohon menerima bukti tertulis penerimaan permintaan informasi dari Petugas Pelayanan Informasi.
2. Pemohon menerima tanggapan tertulis dari Petugas Pelayanan Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.



### Peningkatan Fasilitas Ramah Difabel

PTPN berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang inklusif dan secara bertahap terus meningkatkan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik di lingkungan kantor serta sarana digital yang mudah diakses. Sistem layanan PPID dirancang untuk memudahkan semua pengguna, dengan fitur yang memperhatikan kebutuhan khusus, seperti teks berukuran besar, navigasi yang mudah, serta konten audiovisual yang mendukung pemahaman informasi secara lebih luas serta dengan penerjemah bahasa isyarat. Bagi penyandang disabilitas, perusahaan menyediakan area parkir khusus, fasilitas kursi roda, serta bantuan dari petugas untuk memudahkan akses ke area layanan informasi jika diperlukan.



Gambar 18. Video tutorial pelayanan informasi publik PTPN



Gambar 19. Fasilitas area parkir khusus dan kursi roda di perkantoran PTPN

## PPID

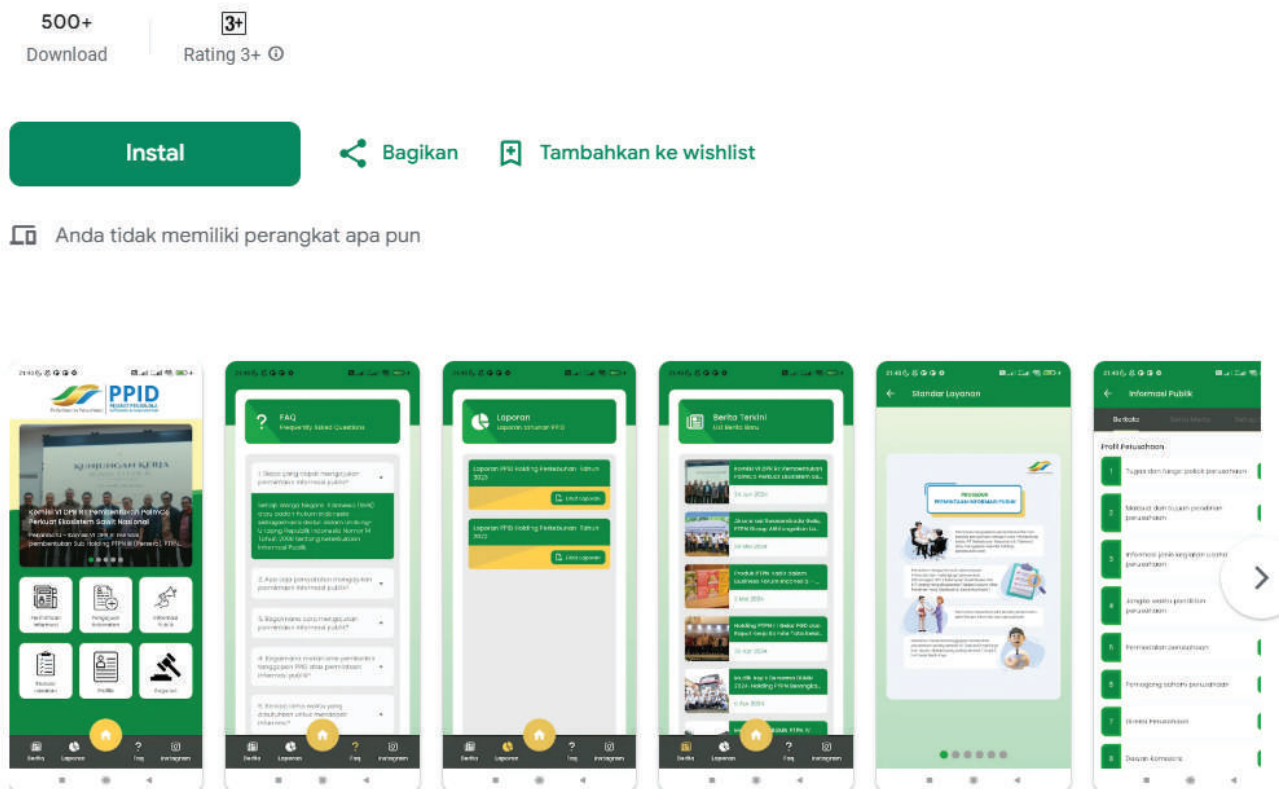
Sebagai bagian dari inovasi di tahun 2024, PTPN meluncurkan aplikasi mobile yang tersedia di perangkat Android dan iOS untuk mempermudah dan menambah pilihan platform dalam mengakses informasi terkait perusahaan. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat dengan cepat mengajukan permintaan informasi, mengakses dokumen publik yang telah tersedia, serta mendapatkan notifikasi terkait pembaruan informasi terbaru PTPN.

Setelah melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan informasi, PTPN juga telah merencanakan pengembangan website khusus PPID untuk tahun 2025 yang terpisah dari website korporat

utama. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kemudahan akses bagi publik dalam memperoleh informasi yang lebih terstruktur dan terfokus pada layanan keterbukaan informasi. Dengan pemisahan ini, masyarakat dapat dengan lebih cepat menemukan dokumen publik, mengajukan permohonan informasi, serta mengakses berbagai panduan dan kebijakan terkait transparansi perusahaan tanpa harus menavigasi melalui konten korporat lainnya. Website khusus ini juga akan dilengkapi dengan fitur pencarian yang lebih optimal, tampilan yang lebih ramah pengguna, serta integrasi dengan aplikasi mobile PPID.

# PPID PTPN

PT Perkebunan Nusantara III (persero)



Gambar 20. Aplikasi mobile PPID PTPN

# ANGGARAN

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada PTPN, anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan program-program PPID berada pada fungsi Divisi Sekretaris Perusahaan dan diajukan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Untuk memastikan keterbukaan informasi yang selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan publik, PPID juga berkolaborasi dengan berbagai divisi atau unit kerja terkait dalam pengalokasian anggaran.

Pada tahun 2024, anggaran yang tersedia digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif strategis dalam peningkatan layanan informasi publik, termasuk:

1. Rapat koordinasi dan pelatihan peningkatan kompetensi baik di lingkungan holding maupun subholding.
2. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, seperti pembuatan ruangan khusus PPID yang dilengkapi fasilitas seperti meja, kursi, laptop, telepon, TV display, dan area tunggu.
3. Pengelolaan konten-konten kreatif keterbukaan informasi, baik melalui website resmi maupun media sosial untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik.
4. Produksi video panduan pelayanan informasi publik, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan penerjemah bahasa isyarat.



Gambar 21. Konten-konten kreatif untuk meningkatkan engagement dengan publik



## HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PTPN secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan pengembangan aspek-aspek keterbukaan informasi di lingkungan perusahaan. Upaya ini mencakup perbaikan sistem, optimalisasi prosedur, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejumlah program kerja prioritas telah berhasil diselesaikan, diantaranya mencakup pembauran dokumen kebijakan internal, peningkatan kompetensi pengelola PPID, pengembangan aplikasi, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi baik dengan PPID Pelaksana maupun antar badan publik.

### Pembaruan Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan informasi pada tahun sebelumnya, maka perusahaan melakukan pembaruan terhadap Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Dokumen ini telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor: DSPN/SKPTS/129/2023 dan dapat diakses pada laman website <https://holding-perkebunan.com/ppid/regulasi/>

Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan perkembangan regulasi keterbukaan informasi dan memastikan bahwa layanan kepada publik semakin efektif, transparan, dan akomodatif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Pembaruan pedoman ini mencakup:

1. Ketentuan struktur PPID yang lebih melibatkan divisi atau unit-unit kerja yang dapat meningkatkan efektifitas pelayanan informasi publik, baik di tingkat PPID Utama maupun PPID Pelaksana.
2. Pembaruan klasifikasi informasi publik yang terdiri dari Daftar Informasi Publik (Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat) serta Informasi yang Dikecualikan.
3. Penyempurnaan mekanisme pengelolaan informasi, termasuk prosedur permintaan informasi dan pengajuan keberatan bagi Pemohon.
4. Detail ketentuan penyelenggaraan pelayanan informasi pada PPID Pelaksana yang meliputi tata kelola, sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi, kompetensi yang perlu dikembangkan, hingga pelaporan secara berkala kepada PPID Utama.

### Pembaruan Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik (DIP) mencakup berbagai kategori informasi, seperti informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan karena alasan perlindungan data atau kepentingan tertentu. Penyusunan dan pembaruan DIP bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi publik serta pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang relevan dan terkini. Sesuai ketentuan yang berlaku, DIP wajib diperbarui sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali dan diumumkan pada website perusahaan.

Pembaruan DIP dimulai dengan pengumpulan data dari seluruh divisi, untuk memastikan kelengkapan dan validitas informasi sebelum difinalkan oleh PPID berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 serta regulasi terkait lainnya. Selama proses ini, PPID PTPN juga melakukan pendampingan kepada seluruh divisi pemilik informasi guna memastikan informasi yang didokumentasikan akurat dan sesuai standar keterbukaan, sehingga setiap data yang tersedia bagi publik tetap kredibel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

PTPN melakukan optimalisasi penyajian informasi dalam format yang lebih interaktif dan ramah pengguna dalam bentuk Daftar Informasi Publik Online yang dapat diakses pada laman website berikut:

<https://holding-perkebunan.com/ppid/informasi-publik/daftar-informasi-publik-online/>

### Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Dalam rangka memastikan bahwa kebijakan pengecualian informasi di PTPN diterapkan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, PPID PTPN secara rutin melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dari akses publik. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun untuk meninjau kembali kelayakan suatu informasi tetap dikategorikan sebagai rahasia atau dapat diungkapkan kepada publik, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data, kepentingan perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi. Pada tahun 2024, perusahaan telah melakukan uji konsekuensi kembali atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dan telah disahkan melalui Keputusan Direksi No: DSPN/SKPTS/145/2023. Penetapannya dapat diakses pada laman website :

<https://holding-perkebunan.com/ppid/informasi-publik/informasi-tersedia-setiap-saat/>

### Permintaan dan Pengajuan Keberatan Informasi

Sepanjang tahun 2024, PPID Utama PTPN telah menerima 46 permintaan informasi, yang mayoritas berasal dari pemangku kepentingan. Mengingat ruang lingkup bisnis PTPN berfokus pada *Business to Business* (B2B), sebagian besar permintaan berkaitan dengan data perkembangan program kerja perusahaan. Seluruh permintaan yang diajukan telah diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan kepemilikan informasi yang dimiliki perusahaan, dengan rata-rata waktu penyelesaian berkisar antara 5 hingga 10 hari kerja. Secara umum, permintaan informasi datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintahan, mitra kerja, anak perusahaan, serta publik, seperti mahasiswa dan pencari kerja. Adapun jenis informasi yang diminta mencakup:

1. Evaluasi Kinerja dan Tata Kelola BUMN – Permintaan terkait pemeriksaan efektivitas kebijakan holdingisasi BUMN, *cut loss*, serta pengelolaan risiko dan investasi di lingkungan BUMN dan anak perusahaan.
2. Data Keuangan dan Pembiayaan – Meliputi pelunasan MTN, monitoring rekening dana investasi (RDI), *subsidiary loan agreement* (SLA), serta bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS).
3. Riset, Inovasi, dan Pengembangan Bisnis – Permintaan informasi terkait pelaksanaan riset dan inovasi BUMN, serta tren biaya pengadaan jasa konsultansi.
4. Realisasi Program dan Produksi – Data mengenai realisasi produksi tahun 2024, penugasan pengadaan gula konsumsi dari luar negeri, serta perkembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).
5. Kerja Sama dan Investasi – Permintaan terkait potensi kerja sama BUMN dengan pihak asing, pengisian informasi dalam *Investment Book*, serta monitoring capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
6. Laporan Kinerja dan Anggaran – Termasuk permintaan laporan kinerja semester I 2024, kelengkapan RKAP 2024, dan data pengelolaan aset perusahaan.
7. Isu Hukum dan Kepatuhan Regulasi – Meliputi klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi, konfirmasi transaksi perpajakan, serta permintaan dokumen terkait penyelesaian sengketa aset.

Permintaan informasi ini mencerminkan tingginya kebutuhan data terkait kebijakan korporasi, kinerja keuangan, investasi strategis, serta aspek hukum dan tata kelola perusahaan, yang mayoritas diajukan oleh pemangku kepentingan utama dalam industri dan pemerintahan.





# CAPAIAN PPID DAN KOMUNIKASI PUBLIK

## PTPN GROUP

Transparansi yang baik tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, tetapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap tata kelola yang lebih profesional dan berkelanjutan. Komitmen ini telah diwujudkan melalui pengelolaan PPID yang semakin optimal, serta berbagai inisiatif komunikasi publik yang mendapatkan pengakuan luas. Berbagai penghargaan yang diraih PTPN Group dalam kaitannya dengan program-program keterbukaan informasi dan peningkatan brand awareness diantaranya:

- Holding Perkebunan PTPN III (Persero) meraih Penghargaan sebagai “Top 5 BUMN Informatif” pada ajang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024;
- Holding Perkebunan PTPN III (Persero) meraih peringkat TOP 10 skoring media dari 132 BUMN melalui ajang Agenda Setting Kementerian BUMN;
- PTPN IV Regional V meraih Penghargaan dari Asosiasi Pers yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai BUMN Paling Informatif.
- PTPN I Regional 4 meraih penghargaan pada kategori “Press Release Terbaik” di Media Relations Award 2024 yang diadakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS);
- PTPN I Regional 4 meraih penghargaan Indonesia CSR Brand Equity Awards dari *The Iconomics*;
- PTPN IV PalmCo meraih penghargaan Kategori *Outstanding Sustainable Initiatives* dari Perusahaan Media di CNN Award 2024;

- PTPN IV Regional V meraih penghargaan pada Tribun Award 2024 untuk kategori Perusahaan Ramah Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Atas komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Environmental, Sustainability, dan Governance (ESG)*.
- PTPN IV Regional III meraih penghargaan Tribun Award 2024 Kategori *The Best Digital Agroindustry Transformation in Riau Province*;



Gambar 22. Penghargaan PTPN III (Persero) sebagai Top 5 BUMN Informatif



Gambar 23. PTPN I regional 4 menerima penghargaan pada Media Relations Award 2024



Gambar 24. PTPN IV menerima penghargaan *Outstanding Sustainable Initiatives* pada CNN Indonesia Awards 2024

# KENDALA & REKOMENDASI

## PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan informasi, PTPN terus mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi dengan PPID Pelaksana. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi, diantaranya:

### 1. Keberlanjutan Pelayanan Informasi Publik

Tantangan utama dalam pelayanan informasi publik adalah memastikan keberlanjutannya secara konsisten, baik dalam hal responsivitas terhadap permintaan informasi maupun pemutakhiran data yang tersedia bagi publik. Pergantian personel, perubahan kebijakan internal, serta dinamika bisnis perusahaan sering kali memengaruhi kelancaran pelayanan informasi.

### 2. Integrasi Pelayanan dengan PPID Pelaksana

Koordinasi dan integrasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana masih menjadi tantangan. Perbedaan sistem, standar operasional, dan kesiapan masing-masing PPID Pelaksana dalam mengelola informasi publik dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penyediaan informasi

### 3. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Meskipun digitalisasi layanan informasi publik telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam pengelolaan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Beberapa PPID Pelaksana masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi informasi, seperti sistem manajemen data yang terpusat, sehingga dapat memperlambat proses penyediaan informasi kepada publik.

### 4. Kapasitas SDM Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik

Kesiapan sumber daya manusia dalam memberikan layanan informasi publik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami regulasi keterbukaan informasi dan teknis pengelolaan data.

### 5. Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Kendala yang sering muncul dalam proses ini di PTPN adalah ketidakkonsistenan dalam penafsiran aturan, keterbatasan kapasitas SDM dalam melakukan pengujian secara objektif, serta kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara PPID Utama dan PPID Pelaksana.

### 5. Kesadaran Publik dan Partisipasi Masyarakat

Meski perusahaan telah menginformasikan ketentuan atau prosedur dalam memanfaatkan layanan informasi PPID, namun demikian masih terdapat permohonan yang tidak sesuai dengan kepemilikan informasi perusahaan.

## Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Mengacu pada kendala yang dihadapi perusahaan dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik, selanjutnya diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang berkelanjutan, diantaranya:

1. Untuk memastikan pelayanan informasi tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi perubahan personel atau kebijakan, perusahaan perlu menerapkan sistem pencatatan dan transfer pengetahuan yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, penggunaan teknologi otomatisasi dalam pemutakhiran data serta penyusunan SOP yang jelas dapat membantu menjaga kesinambungan layanan informasi publik.
2. PTPN perlu memperkuat koordinasi dan integrasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dengan mengembangkan sistem manajemen informasi yang terpusat. Selain itu, pelatihan rutin dan penyusunan pedoman teknis yang seragam akan memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pemahaman dan standar yang sama dalam menyediakan layanan informasi kepada publik.
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan informasi, PTPN dapat mengadopsi sistem digital berbasis cloud yang memungkinkan akses informasi secara lebih fleksibel dan aman.
4. PTPN perlu mengadakan pelatihan berkala bagi petugas PPID agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi keterbukaan informasi dan pengelolaan data. Selain itu, mendorong sertifikasi bagi petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi publik akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan.
5. Untuk memastikan objektivitas dalam menentukan informasi yang dikecualikan, PPID perlu meningkatkan keterlibatan Tim Pertimbangan, dan jika perlu melibatkan divisi-divisi lainnya yang terkait agar pertimbangan yang ada semakin valid. Penyusunan pedoman pengujian konsekuensi yang lebih rinci juga diperlukan agar kebijakan yang diterapkan lebih konsisten dan transparan.
6. Perusahaan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi aktif di berbagai platform, termasuk media sosial dan website resmi. Selain itu, penyediaan sistem tracking permohonan informasi akan membantu pemohon memahami prosedur yang berlaku dan meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan informasi publik.

# 2024

## LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)



**Kantor Pusat | Head Office:**

Gedung Agro Plaza Lt.15,  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,  
Setia Budi, Jakarta Selatan 12950  
Telephone : (+62-21) 29183300  
Fax : (+62-21) 5203030